

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

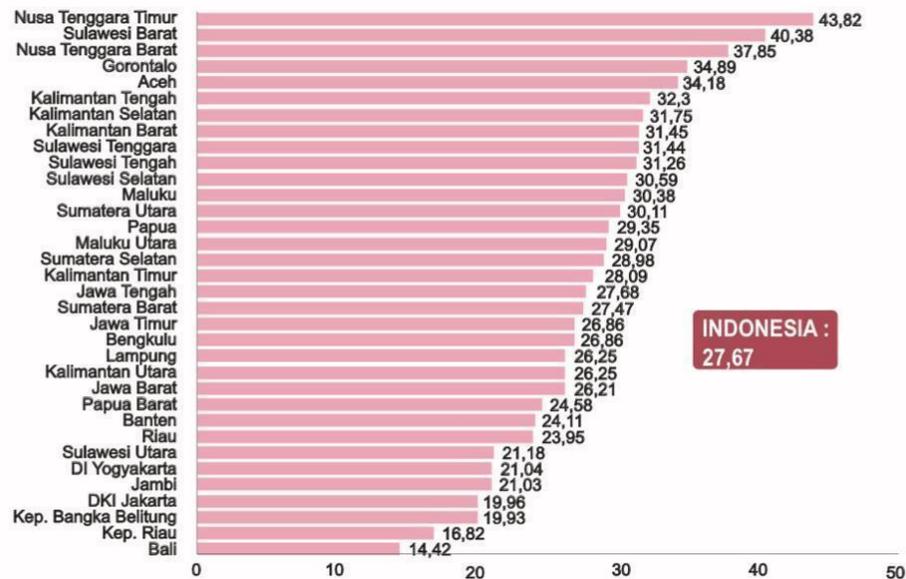
Masalah stunting merupakan masalah yang menjadi sangat penting di negara-negara miskin dan berkembang. Saat ini, stunting sudah menjadi permasalahan yang sangat darurat sehingga harus dilakukan suatu tindakan penanganan atau pencegahan secara cepat, komprehensif dan berkesinambungan. Persoalan stunting di Indonesia berhubungan dengan masalah gizi, hal tersebut terbukti prevalensi angka stunting dan tingginya angka anemia pada ibu hamil yang dapat mengancam kesehatannya. Stunting yang terjadi di Indonesia dianggap menjadi isu strategis nasional sehingga mendukung pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan sebagai usaha pencegahan. Stunting adalah gagal tumbuh pada anak dibawah usia 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)¹.

Prevalensi balita stunting di Indonesia umumnya statis. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan prevalensi stunting pada balita di Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun 2010 sedikit penurunan dan mencapai 35,6%. Namun pada tahun 2013 prevalensi balita stunting kembali meningkat menjadi 37,2%

¹ Sri Yulianty Mozin, Siti Pratiwi Husain. 2020. Strategi Peningkatan Kemampuan Pencegahan dan

dan pada tahun 2018 angka prevalensi stunting menjadi 30,8%². Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat stunting di Indonesia sebesar 30,8%, angka tersebut masih diatas standar yang sudah ditetapkan oleh WHO yaitu 20%. Berikut perkembangan stunting di Indonesia berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Proporsi Stunting pada Balita Tahun 2019 di Indonesia



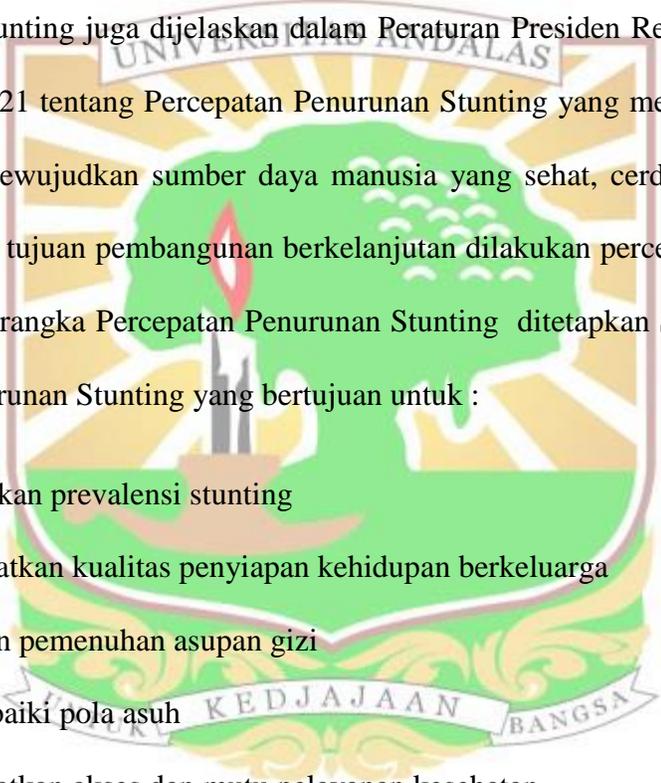
Sumber : Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa angka proporsi stunting pada balita Indonesia berdasarkan hasil SSGBI 2019 masih tinggi yaitu sebesar 27,67%. Dari hasil survei tersebut dapat diketahui bahwa angka stunting di indonesia diatas standar yang sudah ditetapkan dari WHO yaitu 20%.

Pemerintah Indonesia mengupayakan untuk menurunkan prevalensi stunting dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

² Buletin Jendela data dan Informasi Kesehatan. 2020. Situasi Stunting Di Indonesia. Pusat data dan Informasi Kesehatan RI. Hlm.9

2020-2024, salah satu prioritas pembangunan nasional 2020–2024 adalah mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing terdapat indikator terkait dengan terpenuhinya sasaran dan target di bidang kesehatan yaitu percepatan angka prevalensi stunting di Indonesia. Permasalahan stunting juga dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan stunting. Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan untuk :

- 
- a. Menurunkan prevalensi stunting
 - b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga
 - c. Menjamin pemenuhan asupan gizi
 - d. Memperbaiki pola asuh
 - e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
 - f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi

Dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, kelompok sasarannya adalah remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-59 bulan. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, dilaksanakan

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Untuk mencapai target nasional prevalensi stunting ditetapkan target sebesar 14% pada tahun 2024.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia, telah ditetapkan Kabupaten/Kota prioritas intervensi stunting. Berikut ini perkembangan jumlah lokasi fokus penurunan dari tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Lokasi Fokus Penurunan Stunting Di Indonesia

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kab/kota	160 kab/kota	260 kab/kota	360 kab/kota	460 kab/kota	514 kab/kota	514 kab/kota

Sumber : RPJMN 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada setiap tahun terjadi penambahan fokus lokasi penurunan stunting di Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk penanganan stunting di Indonesia. Tahun 2019 ada 160 Kabupaten/Kota menjadi fokus penurunan stunting dan di tahun 2024 terdapat 514 Kabupaten/Kota yang menjadi fokus penurunan stunting untuk mencapai target yang ditetapkan oleh presiden yaitu 14% .

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki anak stunting dengan angka tergolong tinggi. Berdasarkan data Provinsi Sumatera Barat dari hasil Riskesdas dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting 36,5% berdasarkan Riskesdas tahun 2007, Riskesdas tahun 2013 yaitu 39,2%, Riskesdas tahun 2018 yaitu 29,9% dan berdasarkan data SSGBI tahun 2019 pada Gambar 1.1, hal ini menjelaskan angka stunting di Sumbar yaitu sebesar 27,47%. Angka ini masih jauh dari standar nasional yang sudah ditetapkan. Sumatera Barat menempati urutan ketiga di Pulau Sumatera, melampaui daerah

tetangganya yaitu Bengkulu dan Jambi³. Meskipun prevalensi stunting di Sumbar mengalami penurunan, namun angka stunting di Sumbar masih berada di atas standar yang sudah ditetapkan oleh WHO yaitu < 20%⁴. Adapun angka stunting di Sumatera Barat berdasarkan persebaran Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil SSGI tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Sumatera Barat per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Stunting (%)		
		2019	2020	2021
1	Kota Solok	20,73	10,30	18,5
2	Kota Padang	20,92	7,85	18,9
3	Kota Bukittinggi	23,46	12,39	19,0
4	Kabupaten Agam	26,64	10,90	19,1
5	Kabupaten Dharmasraya	26,37	17,27	19,5
6	Kota Payakumbuh	22,3	7,61	20,0
7	Kota Padang Panjang	13,55	16,61	20,0
8	Kota Pariaman	20,78	10,31	20,3
9	Kota Sawahlunto	23,43	8,08	21,1
10	Kabupaten Tanah Datar	23,31	16,44	21,5
11	Kabupaten Pasaman Barat	31,66	18,66	24,0
12	Kabupaten Solok Selatan	34,99	13,89	24,5
13	Kabupaten Pesisir Selatan	30,56	12,44	25,2
14	Kabupaten Kepulauan Mentawai	43,3	19,54	27,3
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	29,94	8,31	28,2
16	Kabupaten Padang Pariaman	21,29	15,65	28,3
17	Kabupaten Sijunjung	30,62	23,32	30,1
18	Kabupaten Pasaman	35,67	19,12	30,2
19	Kabupaten Solok	35,45	18,18	40,1

Sumber : Olahan Peneliti dari Hasil SSGI Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

³ Sumbarprov.go.id. 9 Daerah di Sumbar Tinggi Stunting, Mahyeldi: Manfaatkan Potensi Pangan Lokal Untuk Antisipasi. <https://www.sumbarprov.go.id/home/news/20463-9-daerah-di-sumbar-tinggi-stunting-mahyeldi-manfaatkan-potensi-pangan-lokal-untuk-antisipasi>. Diakses tanggal 22 Maret 2022.

⁴ Rencana Aksi Program Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 – 2024. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. 2020. Hlm. 4

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa prevalensi status gizi dari tahun 2019 – 2021 berdasarkan TB/U Kabupaten/Kota di Sumbar. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021, dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat hanya 5 Kabupaten/Kota yang memiliki angka stunting di bawah 20% yaitu Kota Solok, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam dan Kabupaten Dharmasraya⁵. Adapun sebagian besar Kabupaten/Kota di Sumbar memiliki angka stunting di atas 20% atau belum mencapai target prevalensi stunting nasional dimana kabupaten yang paling rendah performanya dalam penanggulangan stunting di Sumatera Barat adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sijunjung.

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah lokus penurunan stunting di Sumbar. Dari Tabel 1.2 bisa dilihat bahwa tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Pasaman mengalami peningkatan kembali yaitu dari tahun 2019 angka stunting sebesar 35,67% mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 19,12%, namun tahun pada 2021 angka stunting di Pasaman meningkat kembali ke angka 30,2%. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.Ppn/Hk/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021. Berdasarkan tabel 1.2 hasil SSGI tahun 2021 mengenai prevalensi angka stunting di Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman memiliki angka stunting cukup tinggi melebihi standar yang

⁵ Hasil SSGI Kabupaten/Kota Tahun 2021

ditetapkan oleh WHO dan nasional. Kabupaten Pasaman berada di urutan kedua tertinggi di Sumatera Barat dengan angka stunting 30,2% setelah kabupaten Solok.

Berdasarkan hasil Riskesdas Sumatera Barat pada tahun 2018, Kabupaten Pasaman adalah kabupaten dengan angka stunting tertinggi di Sumatera Barat dan ditetapkan sebagai kabupaten prioritas stunting dengan angka stunting 15,89% (sangat pendek) dan 24,67% (pendek)⁶. Menanggapi permasalahan stunting di Kabupaten Pasaman, Pemerintah Kabupaten Pasaman mengeluarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penanganan Stunting. Perbup tentang penanganan stunting tersebut menjelaskan upaya untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Pasaman. Penanganan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia⁷.

Angka stunting yang masih tinggi di Kabupaten Pasaman berkaitan dengan masalah gizi pada balita, faktor penyebabnya yaitu rendahnya asupan gizi yang berkualitas pada makanan yang dikonsumsi, gizi buruk pada ibu hamil dan balita, kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi sebelum hamil dan selama masa kehamilan dan setelah lahir. Kuantitas dan kualitas zat gizi yang terkandung dalam makanan sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan balita, maka dari itu makanan yang dikonsumsi harus memenuhi kebutuhan gizi balita⁸. Begitu juga dengan gizi ibu selama kehamilan, masyarakat kurang memahami bahwa

⁶ Riskesdas Sumatera Barat Tahun 2018

⁷ Peraturan Bupati Pasaman No 57 Tahun 2018 tentang Penanganan Stunting

⁸ Supariasa, I.D.N. 2012. Pendidikan Dan Konsultasi Gizi. EGC: Jakarta

pentingnya gizi selama hamil mempengaruhi status gizi bayi yang dilahirkan nantinya⁹.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya stunting pada anak adalah pola asuh anak. Pola asuh yang diberikan ibu dan keluarga memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Pola asuh merupakan penyebab tidak langsung terjadinya stunting, dan apabila tidak dilaksanakan dengan baik dapat menjadi penyebab langsung terjadinya stunting, artinya pola asuh merupakan faktor dominan terjadinya stunting¹⁰. Menurut Engel *et al.* ada empat unsur penting dalam pola asuh yang memegang peranan penting yaitu nutrisi, kebersihan, kesehatan dan stimulasi psikososial¹¹. Fenomena pola asuh antara Ibu kepada anaknya yang terjadi di Kabupaten Pasaman dapat dilihat melalui cara pemberian makanan dari ibu kepada anaknya. Dalam hal ini, pemberian makan yang dimaksud adalah kontrol orang tua khususnya ibu yang tidak mengawasi secara ketat tentang apa yang dikonsumsi oleh anaknya. Misalnya saja, kurangnya pengawasan dari ibu saat anaknya membeli makanan diluar rumah, yang diketahui makanan atau jajanan tersebut belum tentu kebersihannya. Hal ini berpengaruh terhadap asupan gizi yang masuk ke tubuh anak.

⁹ Elsa Naftalina, dkk. 2019. Hubungan Kadar *Zinc* dan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian *Stunting* Pada Anak Usia 2 – 5 Tahun Di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.19, No 3. Tahun 2019

¹⁰ Ibid.

¹¹ Zikria. 2018. Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 12-35 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Air Dingin Padang Tahun 2018. Universitas Andalas.

Faktor penyebab stunting selanjutnya adalah pemberian ASI non eksklusif pada anak dan bayi usia 0-6 bulan, termasuk di Kabupaten Pasaman yang diketahui bahwa ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan masih memiliki kesadaran yang rendah untuk pemberian ASI eksklusif. Hal ini tentunya memberikan dampak pada pertumbuhan si bayi, karena bayi tidak mendapat asupan yang cukup dari ibu. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinkes Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

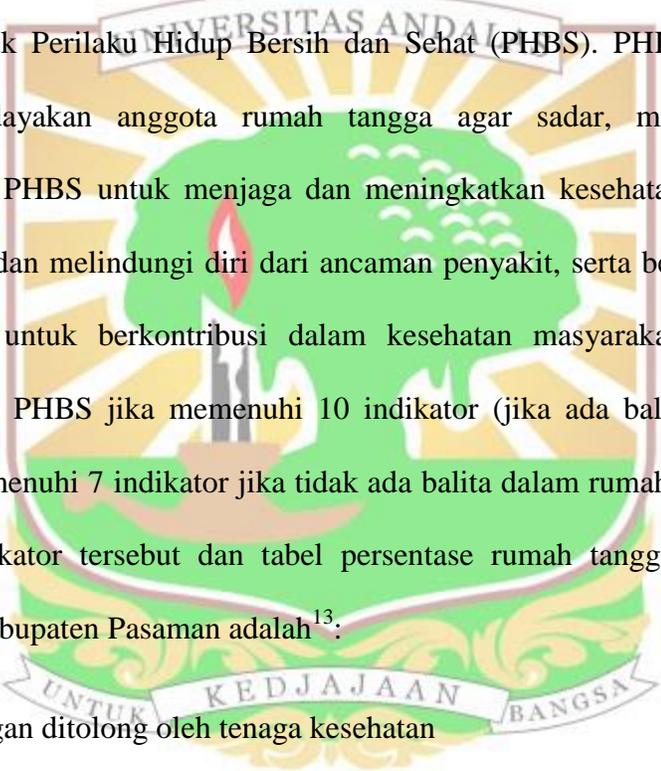
“kesadaran ibu memberikan ASI Eksklusif masih rendah, mereka menganggap bahwa ASI Eksklusif tidak penting padahal ASI berpengaruh terhadap kesehatan dan kecerdasan anak. Bisa juga saat pemberian ASI eksklusifnya full, namun pada saat perpindahan ke MPASI kadang disitu pola asuh yang kurang benar seperti pemberian makan tambahan pendamping ASI, dari pengetahuan si ibu bayi dari cara pemberian jenis makanan yang akan diberikan. Walaupun kadang ASI Eksklusif bagus tapi pada saat bayi perpindahan ke MPASI kurang pas maka otomatis akan mempengaruhi gizi anak. (Wawancara dengan Desmariza sebagai Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, 2 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peran dari ASI Eksklusif yang diberikan oleh ibu kepada anaknya sangat berpengaruh, ibu balita seharusnya mengasahi anaknya yang masih bayi berumur 0-6 bulan agar tetap sehat dan kuat. Sejalan dengan penelitian yang berjudul “Faktor penyebab stunting pada anak usia 24-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Padang Gelugur, kabupaten Pasaman” yang dilakukan oleh Neila Sulung, Husni Maiyanti, dan Nurhayati¹², hal yang harus dilakukan oleh bagian gizi di Puskesmas untuk menangani penyebab

¹² Neila Sulung, dkk. 2020. Faktor Penyebab Stunting Pada Anak Usia 24-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Jurnal Pembangunan Nagari, Volume 5 Nomor 1. Hlm. 8-9

stunting di Pasaman adalah pemberian ASI eksklusif dan variasi makanan. Tugas dari petugas kesehatan dalam memberi informasi pada ibu hamil, informasi terkait dengan asi eksklusif yang ibu hamil harus berikan pada bayinya selama 6 bulan, manfaat yang diperoleh adalah bayi tersebut bisa tetap sehat dan kuat bergizi.

Stunting di Kabupaten Pasaman juga disebabkan karena kurangnya akses air bersih dan sanitasi, serta kesehatan lingkungan seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu mempraktekkan PHBS untuk menjaga dan meningkatkan kesehatannya, mencegah resiko penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan untuk berkontribusi dalam kesehatan masyarakat. Sebuah rumah tangga memiliki PHBS jika memenuhi 10 indikator (jika ada balita dalam rumah tangga) dan memenuhi 7 indikator jika tidak ada balita dalam rumah tangga tersebut. Berikut 10 indikator tersebut dan tabel persentase rumah tangga ber-PHBS per kecamatan di Kabupaten Pasaman adalah¹³:

- 
1. Pertolongan ditolong oleh tenaga kesehatan
 2. Memberikan ASI eksklusif
 3. Menimbang bayi dan balita setiap bulan
 4. Menggunakan air bersih
 5. Mencuci tangan dengan air bersih menggunakan jamban sehat
 6. Memberantas jentik di rumah

¹³ Buku Data Profil Gender Kabupaten Pasaman Tahun 2020

7. Memakan buah dan sayur setiap hari
8. Aktifitas fisik tiap hari
9. Tidak merokok di dalam rumah

Tabel 1.3 Persentase Rumah Tangga ber-PHBS Per Kecamatan di Kabupaten Pasaman Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah yang dipantau	Jumlah ber-PHBS	% PHBS
1	Lubuk Sikaping	5.970	4.044	67.74
2	Bonjol	3.905	2.608	133.49
3	Simpati	2.158	1.417	65.66
4	Tigo Nagari	4.856	2.834	58.36
5	Panti	7.789	4.097	124.02
6	Duo Koto	6.566	3.723	133.41
7	Padang Gelugur	6.922	3.873	55.95
8	Rao Selatan	4.721	2.834	59.98
9	Rao	5.832	3.621	62.09
10	Rao Utara	1.945	1.076	55.32
11	Mapat Tunggul	1.596	965	60.46
12	Mapat Tunggul Selatan	1.075	642	59.81
	Kabupaten Pasaman	54.534	33.968	62.29

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah rumah tangga yang dipantau adalah sebanyak 54.534 rumah tangga dan yang ber-PHBS 33.968 rumah tangga (62,29%). Kecamatan Panti memiliki rumah tangga yang paling banyak dipantau yaitu 7.789 rumah tangga dan jumlah yang ber-PHBS 4.097 rumah tangga.

Faktor tidak langsung penyebab stunting di Kabupaten Pasaman adalah pengetahuan masyarakat yang masih menganggap stunting pada balita merupakan faktor keturunan atau genetik, sehingga stunting tidak dianggap sebagai masalah krusial yang harus ditangani dengan serius. Berdasarkan dari wawancara peneliti

dengan Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman
yaitu :

“kesadaran masyarakat untuk penanganan stunting masih kurang, para orang tua beranggapan bahwa stunting merupakan faktor keturunan. Orang tua yang mempunyai balita marah apabila anaknya dikatakan stunting setelah dilakukan pendataan oleh petugas posyandu. Masyarakat tidak mengutamakan kualitas dari makanan yang dikonsumsi, mereka lebih mengutamakan kuantitas dari makanan yang penting banyak namun tidak memperhatikan gizi yang dikonsumsi dari makanan. Memang kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi masih kurang” (Wawancara dengan Desmariza sebagai Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinkes Kabupaten Pasaman, 21 Januari 2022)

Hal senada juga disampaikan oleh Petugas Gizi Puskesmas Pegang Baru sebagai berikut:

“Kurangnya kesadaran masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat menjadi faktor penyebab stunting, masih ada balita yang BAB di daratan hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS. Penyebab lainnya yaitu kepemilikan jamban di setiap rumah masih kurang, masyarakat masih banyak memanfaatkan fasilitas umum seperti MCK”(Wawancara dengan Resti sebagai Petugas Gizi Puskesmas Pegang Baru, 14 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya stunting adalah anggapan bahwa stunting bukanlah hal yang serius dan perlu ditangani. Sehingga pemerintah secara serius berupaya untuk mengurangi tingkat stunting. Berikut perkembangan stunting dari puskesmas-puskesmas di Kabupaten Pasaman tahun 2021 :

Tabel 1.4 Data Jumlah Balita Stunting di Kabupaten Pasaman tahun 2021

No	Puskesmas	Jumlah Balita Stunting
1	Bonjol	182
2	Kumpulan	147
3	Ladang Panjang	116
4	Simpati	219
5	Lubuk Sikaping	150
6	Sundatar	256
7	Cubadak	227
8	Simpang Tonang	203
9	Pegang Baru	358
10	Kuamang	181
11	Tapus	83
12	Rao	92
13	Pintu Padang	88
14	Silayang	196
15	Lansat Kadap	133
16	Koto Rajo	126
	Pasaman	2757

Sumber: Olahan Peneliti dari Laporan Dinkes Kabupaten Pasaman

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah balita stunting puskesmas-puskesmas di Kabupaten Pasaman pada tahun 2021. Terdapat 16 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Pasaman, Puskesmas Pegang Baru menempati urutan pertama dengan jumlah anak stunting terbanyak yaitu 358 anak. Kemudian jumlah stunting terendah berada pada Puskesmas Tapus sebanyak 83 anak stunting.

Puskesmas Pegang Baru merupakan UPT atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di Kabupaten Pasaman yang menjadi fasilitas kesehatan bagi masyarakat tingkat pertama dan bertanggung jawab kepada kesehatan masyarakat salah satunya yaitu masalah stunting. Puskesmas Pegang Baru merupakan puskesmas yang berada di Kecamatan Panti, pada wilayah kerja puskesmas Pegang Baru terdapat satu nagari

yang menjadi lokasi fokus penanganan stunting yaitu Nagari Panti berdasarkan penetapan Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/471/BUP-PAS/2020 tentang Penetapan Nagari Fokus Pencegahan dan Penanganan Serta Intervensi Stunting di Kabupaten Pasaman. Nagari Panti berada di urutan kedua dengan angka stunting tertinggi di Kabupaten Pasaman yaitu 28,1%.

Puskesmas Pegang Baru merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya memiliki jumlah anak stunting terbanyak di Kabupaten Pasaman. Salah satu yang menjadi penyebab tingginya angka stunting di wilayah kerja puskesmas Pegang Baru adalah masyarakat kurang membiasakan untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti kebiasaan merokok orang tua dan tidak ada ketersediaan akses jamban sehat. Berikut wawancara peneliti dengan petugas gizi puskesmas Pegang Baru sebagai berikut :

“Kurang nya kesadaran masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat menjadi faktor penyebab stunting, masih ada balita yang BAB di daratan hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS. Penyebab lainnya yaitu kepemilikan jamban di setiap rumah masih kurang, masyarakat masih banyak memanfaatkan fasilitas umum seperti MCK”(Wawancara dengan Resti sebagai Petugas Gizi Puskesmas Pegang Baru, 14 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tersebut dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang yang menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting. Mengacu kepada tabel 1.3 yang menjelaskan persentase rumah tangga ber-PHBS per kecamatan di Kabupaten Pasaman, bahwa Kecamatan Panti merupakan jumlah rumah tangga terbanyak di Kabupaten Pasaman

yang dipantau yaitu sebanyak 7.789 rumah tangga dan jumlah yang ber-PHBS 4.097 rumah tangga.

Selain itu kesadaran masyarakat untuk disiplin untuk datang ke posyandu masih kurang. Maka dari itu puskesmas Pegang Baru membuat suatu inovasi untuk meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke posyandu. Inovasi tersebut diberi nama Inovasi Abang Merayu, inovasi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan di posyandu dengan merayakan ulang tahun balita saat posyandu. Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh petugas puskesmas dan kader untuk meningkatkan sasaran yang datang ke posyandu.

Untuk bisa melihat bagaimana upaya dari Dinkes dalam rangka untuk penanganan stunting di wilayah yang berbeda, maka peneliti juga akan melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan penanganan stunting oleh Dinkes Kabupaten Pasaman di wilayah dengan angka stunting yang rendah yaitu Puskesmas Tapus dan nagari menjadi fokus penelitian peneliti yaitu nagari Padang Gelugur karena nagari tersebut angka stuntingnya paling rendah di wilayah kerja Puskesmas Tapus. Pada wilayah kerja Puskesmas Tapus terdapat 4 nagari yaitu Nagari Padang Gelugur, Bahagia Padang Gelugur, Sitombol Padang Gelugur dan Sontang Cubadak.

Prevalensi stunting di kabupaten Pasaman dikategorikan tinggi, hal ini sangat mengkhawatirkan karena balita yang terkena stunting membutuhkan perhatian dari berbagai kalangan pemerintah baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan yang terendah desa/nagari. Untuk percepatan penanganan stunting di Kabupaten

Pasaman maka ditetapkan nagari fokus pencegahan stunting. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/471/BUP-PAS/2020 tentang Penetapan Nagari Fokus Pencegahan dan Penanganan Serta Intervensi Stunting di Kabupaten Pasaman. Nagari yang menjadi lokus penurunan stunting untuk tahun 2020-2021 berdasarkan Keputusan tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.5 Penetapan Nagari Fokus Pencegahan Dan Penanganan Serta Intervensi Stunting Di Kabupaten Pasaman

No	Kecamatan	Nagari	Stunting (%) 2021
1	Tigo Nagari	Binjai	23,4
		Ladang Panjang	20,2
		Malampah	23,8
2	Simpati	Simpang	25,1
		Alahan Mati	18,9
3	Bonjol	Koto Kaciak	17,8
		Ganggo Hilia	19,0
		Ganggo Mudiak	21,9
4	Lubuk Sikaping	Tanjung Baringin	9,8
5	Panti	Panti	28,1
		Panti Timur	14,7
6	Rao Selatan	Lubuk Layang	11,4
		Lansek Kodok	12,1
		Tanjung Betung	11,3
7	Rao Utara	Koto Rajo	24,9
8	Mapat Tunggul	Lubuk Gadang	13,3
		Pintu Padang	8,6
		Muara Tais	10,8
9	Mapat Tunggul Selatan	Muaro Sungai Lolo	34,6
		Silayang	21,8
10	Dua Koto	Cubadak	9,2
		Simpang Tonang	15,8

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa ditetapkan sebanyak 22 nagari dari 37 jumlah nagari di Kabupaten Pasaman yang menjadi lokus penanganan stunting. Nagari-nagari tersebut ditetapkan sebagai nagari fokus untuk pencegahan dan penanganan serta intervensi stunting di Kabupaten Pasaman. Nagari yang ditetapkan tersebut menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan stunting serta intervensi spesifik maupun sensitif oleh semua stakeholder dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan wawancara dengan Wawancara dengan Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman :

“semua nagari yang tinggi prevalensi stunting nya diatas 20% dijadikan lokus, semua program biar lokus stunting atau tidak program dari kesehatan untuk intervensi spesifik sama, yang membedakan nanti nagari tersebut lokus atau tidak kalau ada intervensi sensitif. Karena untuk penanganan stunting itu ada intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Kenapa kita lokus kan, nanti bedanya di intervensi sensitif” (Wawancara dengan Desmariza sebagai Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, 21 Januari 2022)

Tujuan dari penanganan stunting adalah salah satu cara meningkatkan kualitas SDM dan status gizi masyarakat. Upaya penanganan stunting yang dilakukan Dinkes Kabupaten Pasaman dilaksanakan dengan kegiatan perbaikan gizi yang dilakukan berdasarkan dari intervensi spesifik. Intervensi spesifik merupakan kegiatan penanganan masalah gizi yang dilakukan oleh bidang kesehatan yang ditujukan kepada rumah tangga 1000 HPK. Dalam Peraturan Bupati Pasaman No 57 tahun 2018 tentang penanganan stunting menjelaskan sasaran intervensi gizi spesifik

antara lain ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan serta ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan¹⁴. Pada pasal 1 menjelaskan bahwa kegiatan intervensi gizi spesifik dilaksanakan oleh bidang kesehatan yaitu Dinkes Kabupaten Pasaman. Berikut wawancara peneliti dengan Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

“Sebagai langkah untuk penanganan stunting di Kabupaten Pasaman, Dinas Kesehatan melakukan berbagai kegiatan penanganan stunting dengan intervensi spesifik. Program yang kita lakukan mulai dari balita lahir dengan memberikan vitamin A kepada bayi dimulai dari bayi usia 6 bulan dan pemberian vitamin untuk ibu nifas yang baru siap melahirkan. Program lainnya yaitu pemberian makanan tambahan, pemberian obat cacing untuk balita dan anak sekolah, serta pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil.”(Wawancara dengan Desmariza sebagai Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, 21 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui program yang dijalankan untuk penanganan stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Program-program yang dilakukan merupakan sebagai upaya untuk penanganan stunting di Kabupaten Pasaman.

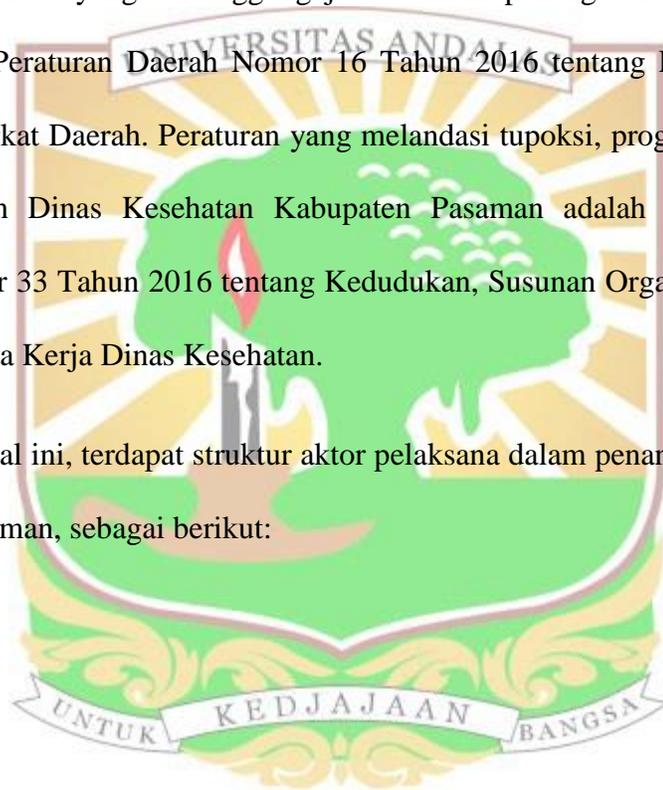
Untuk penanganan stunting dukungan dari berbagai pihak terus mengalir kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Kesehatan untuk penanganan dan intervensi prevalensi stunting di Kabupaten Pasaman. Seperti bantuan dari Kemenkes berupa makanan tambahan ibu hamil dan menyusui, distribusi makanan tambahan diberikan untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis dan balita kurus. Bantuan tersebut disalurkan setiap tahun ke seluruh posyandu di Pasaman. Kemudian juga ada

¹⁴ Ibid

bantuan dari Indo Jalito Peduli bersama TP PKK Sumatera Barat yang diserahkan kepada TP PKK Pasaman beberapa waktu lalu di Kecamatan Pasaman. Penyerahan makanan tambahan ibu hamil dan balita di pusatkan di Kecamatan Panti bersama TP PKK Pasaman¹⁵.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman adalah unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman yang bertanggung jawab untuk penanganan stunting. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan yang melandasi tupoksi, program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman adalah Peraturan Bupati Pasaman Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dalam hal ini, terdapat struktur aktor pelaksana dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman, sebagai berikut:



¹⁵ Harian Koran Padang. 2021. Dinkes Pasaman dan Sejumlah Pihak Bahu-Membahu Cegah Stunting. Diakses di <https://hariankoranpadang.com/2021/12/dinkes-pasamn-dan-sejumlah-pihak-bahu-membahu-cegah-stunting/> pada tanggal 20 April 2022.

Gambar 1.2 Aktor Pelaksana Penanganan Stunting di Kabupaten Pasaman



Sumber: Olahan Peneliti, 2022.

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwasannya terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/436/BUP-PAS/2020 tentang Pembentukan Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pasaman Periode 2020-2024. Untuk penanggung jawab mengenai stunting di Kabupaten Pasaman dipegang oleh Bupati Pasaman yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Untuk pelaksanaan penanganan stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan melalui kegiatan perbaikan gizi yang dilakukan berdasarkan dari intervensi spesifik.

Pada struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan penanganan stunting adalah seksi gizi dan kesehatan keluarga. Dalam pelaksanaan penanganan stunting, Dinas Kesehatan memiliki UPT atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yaitu

Puskesmas yang menjadi fasilitas kesehatan bagi masyarakat tingkat pertama dan bertanggung jawab kepada kesehatan masyarakat salah satunya yaitu masalah stunting. Dalam penanganan stunting, puskesmas dibantu oleh kader posyandu di setiap masing-masing wilayah kerja Puskesmas. Posyandu adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, melaksanakan pembangunan yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan memberikan kesempatan masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang esensial. Kemudian kader posyandu dipilih melalui musyawarah nagari untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu. Dinas kesehatan bertanggung jawab untuk memonitoring dan mengevaluasi Puskesmas dan Posyandu secara langsung dalam penanganan stunting.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan. Dalam penanganan stunting stunting, Dinas Kesehatan berfungsi dalam pengumpulan data stunting. Dinas kesehatan merupakan leading sector yang berperan penting untuk penanganan stunting di Kabupaten Pasaman, khususnya penanganan stunting secara intervensi spesifik dengan kelompok sasaran rumah tangga 1000 HPK.

Dinkes Kabupaten Pasaman mempunyai tugas yaitu: “Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah

Kabupaten”. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kesehatan
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesehatan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat pelaksanaan strategi Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman menggunakan teori inti strategi dari Richard P. Rumelt. Salah satu unsur dalam teori inti strategi yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt adalah Diagnosis. Diagnosis dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi situasi kemudian menghubungkannya dengan fakta dan memperhatikan masalah yang terjadi. Dinkes Kabupaten Pasaman perlu mengidentifikasi dengan melihat situasi stunting di Pasaman. Dinkes Kabupaten Pasaman harus melihat tantangan yang dihadapi untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Pasaman. Tujuannya adalah supaya bisa mengetahui bagaimana metode dan tindakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tingginya angka stunting di Kabupaten Pasaman disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan masalah gizi pada balita yang ditandai dengan rendahnya asupan makanan yang bergizi pada makanan yang konsumsi, gizi buruk yang dialami ibu hamil dan balita, pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan,

saat saat hamil dan setelah lahir masih kurang. Pola asuh anak dan anak usia 0-6 bulan dan balita tidak diberi ASI eksklusif.

Dalam pelaksanaan penanganan stunting, Dinas Kesehatan masih mengalami beberapa tantangan hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, yaitu sebagai berikut :

“Masih banyak ibu balita stunting dan ibu hamil tidak mau datang ke posyandu. Alasan ibu-ibu tersebut tidak mau membawa anak-anaknya ke posyandu adalah karena mereka ingin pergi bekerja dan tidak sempat untuk datang ke posyandu. Sebenarnya kesadaran dari masyarakat mengenai stunting masih sangat kurang, mereka tidak menanggapi kalau permasalahan stunting merupakan permasalahan yang sangat serius”(Wawancara dengan Desmariza sebagai Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinkes Kabupaten Pasaman, 21 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui kesadaran masyarakat mengenai stunting masih kurang khususnya ibu hamil dan ibu yang mempunyai balita, masih banyak ibu hamil dan ibu yang mempunyai balita tidak mau datang ke posyandu dengan alasan tidak sempat datang ke posyandu karena mereka ingin pergi bekerja.

Selain itu, faktor sarana dan prasarana kesehatan berpengaruh terhadap penanganan stunting. Dukungan fasilitas kerja yang memadai merupakan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan oleh tenaga kesehatan. Tentu saja, jika sarana dan prasarana tidak mendukung hal tersebut, maka akan berdampak terhadap kegiatan penanganan stunting yang kurang maksimal. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman

berusaha untuk melengkapi dalam pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Berikut wawancara peneliti dengan Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, yaitu sebagai berikut :

“ketersediaan alat antropometri yang sesuai dengan standar di setiap posyandu masih kurang. Setiap puskesmas minimal mempunyai 10 alat antropometri, sehingga pada saat penimbangan massal penggunaan alat antropometri yang ada di puskesmas digunakan secara bergantian di posyandu. Alasan tidak tersedianya alat antropometri yang tercukupi di setiap posyandu yaitu karena alasan dana. Kita tidak mempunyai dana APBD untuk membeli alat tersebut, dana kita hanya dari pusat. Itupun dana yang diberikan dari pusat kita tidak dapat menentukan, karena pusat sudah mengatur dimana akan diberikan bantuan alat antropometri.”
(Wawancara dengan Desmariza sebagai Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, 2 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang digunakan sebagai penunjang untuk penanganan stunting di Kabupaten Pasaman masih kurang. Minimnya sarana dan prasarana di beberapa Puskesmas terkendala oleh dana. Antropometri Kit merupakan alat timbangan dewasa dan bayi, timbangan bayi untuk mengukur berat badan bayi, meteran tinggi badan bayi dan meteran untuk mengukur lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar pinggang dan pinggul. Sehingga alat Antropometri Kit merupakan alat yang dibutuhkan dan mendukung untuk penanganan stunting di Kabupaten Pasaman yang dilakukan oleh petugas gizi puskesmas.

Elemen kedua dalam teori ini strategi Richard P. Rumelt adalah kebijakan penuntun. Kebijakan penuntun hadir atas dasar diagnosis yang sudah dilakukan

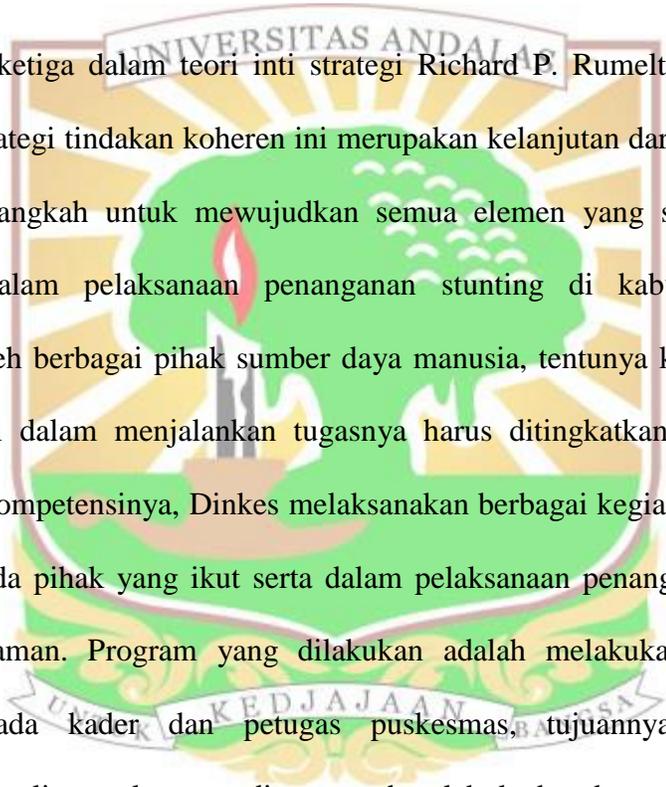
sebelumnya. Diagnosis dari situasi dan tantangan yang terjadi dalam penanganan stunting, tentunya harus digunakan kebijakan untuk mengatasinya. Kebijakan tersebut digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan penanganan stunting di Kabupaten Pasaman, dalam pelaksanaan penanganan stunting dapat mengacu kepada kebijakan penuntun.

Dinas Kesehatan mempunyai metode dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman dengan melaksanakan program kegiatan perbaikan gizi sebagai upaya penanganan stunting di Pasaman. Kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan merupakan kegiatan yang mengarah kepada intervensi spesifik. Program kegiatan yang dilaksanakan yaitu pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil, catin, remaja putri. Pemberian Vitamin A untuk balita, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang KEK, untuk balita kurus dan balita stunting. Kegiatan pos gizi dan Edukasi 1000 HPK dengan sasaran adalah calon pengantin, ibu hamil dan ibu yang mempunyai balita. Berikut wawancara peneliti dengan Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, yaitu sebagai berikut :

“salah satu program yang dilakukan untuk penanganan stunting adalah kegiatan posyandu dan pos gizi. Kegiatan pos gizi ini merupakan kegiatan mulai dari bagaimana cara pemilihan bahan makanan untuk anak balita dan ibunya, balita yang bermasalah dengan gizi yang berat badannya tidak naik dan ibunya diminta untuk hadir di posyandu kemudian diajarkan bagaimana cara pemilihan bahan baku makanan yang bagus, dan bagaimana cara mengolahnya, nanti berapa porsi makan untuk anak makan. Di ajarkan ibu balita tentang pemilihan makanan yang bagus dengan nilai gizinya serta cara mengolah makanannya dan volume makanan yang harus di makan oleh anak untuk satu kali makan. Kemudian di posyandu juga dilakukan penyuluhan tentang kesehatan

terutama tentang PHBS dan penyuluhan tentang asi eksklusif.”
(Wawancara dengan Desmariza sebagai Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinkes Kabupaten Pasaman, 3 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui metode yang dijalankan Dinkes dalam penanganan stunting di kabupaten Pasaman dengan melaksanakan program perbaikan gizi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinkes merupakan kegiatan yang mengarah kepada intervensi spesifik.



Elemen ketiga dalam teori inti strategi Richard P. Rumelt adalah tindakan koheren. Inti strategi tindakan koheren ini merupakan kelanjutan dari dua inti strategi yang menjadi langkah untuk mewujudkan semua elemen yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaan penanganan stunting di kabupaten Pasaman dilaksanakan oleh berbagai pihak sumber daya manusia, tentunya kompetensi SDM suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya harus ditingkatkan. Sebagai upaya meningkatkan kompetensinya, Dinkes melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dan sosialisasi kepada pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Program yang dilakukan adalah melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada kader dan petugas puskesmas, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di posyandu oleh kader dan petugas kesehatan dengan cara mengadakan pelatihan. Perlu langkah yang dilakukan untuk memberdayakan kader supaya bisa profesional untuk memantau perkembangan balita, serta bisa membangun kemitraan ditengah masyarakat supaya bisa

meningkatkan dukungan dan memanfaatkan Posyandu secara maksimal¹⁶. Berikut wawancara peneliti dengan Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, yaitu sebagai berikut :

“Peran dari kader posyandu sangat penting, karena kader bertanggungjawab dalam kegiatan Posyandu. Apabila kader posyandu tidak aktif maka kegiatan posyandu tidak terlaksana dengan maksimal. Dengan adanya kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang tujuannya untuk kader posyandu dan petugas puskesmas diharapkan bisa meningkatkan promosi kesehatan dan menggerakkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan kegiatan posyandu khususnya bagi kelompok rawan masalah gizi seperti balita, ibu hamil, ibu nifas dan menyusui.” (Wawancara dengan Desmariza sebagai Koordinator Program Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, 21 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui adanya kegiatan pelatihan yang diadakan untuk kader posyandu dan petugas puskesmas. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi kader dan petugas puskesmas dalam pelayanan di posyandu.

Pada tahap awal, peneliti melakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian Dahlam Tampubolon tentang Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi menghasilkan penanganan stunting di Provinsi Riau masih terlaksana, tetapi dengan beberapa kendala terkait koordinasi, pembiayaan dan partisipasi perangkat desa menjadi permasalahan umum di kedua kabupaten lokus. Pemerintah telah menyusun berbagai cara untuk mengatasi

¹⁶ Iku Nurhidayah, dkk. 2019. Revitalisasi Posyandu Melalui Pemberdayaan Kader Kesehatan. Fakultas Kedokteran Unpad Vol 2. No 2. Hlm 153

stunting, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Pemerintah Rokan Hulu melaksanakan berbagai program dan kegiatan terkait dengan intervensi stunting melalui Dinas Kesehatan. Pemerintah Provinsi Riau baru saja menambahkan perlakuan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan revisi RPJMD 2014-2019. Di Provinsi Riau, tindakan mitigasi dilaksanakan dengan bantuan strategi intervensi yang spesifik dan sensitif. Kegiatan intervensi spesifik sebagian besar terdapat dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan. Pada saat yang sama, intervensi sensitif di tingkat provinsi maupun kabupaten dipengaruhi oleh banyak pemangku kepentingan¹⁷.

Selanjutnya penelitian Irma Fitriana Ulfah dan Arief Budi Nugroho dengan Judul Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember. Menghasilkan bahwa, terdapat permasalahan sosial ekonomi yang dapat berkontribusi terhadap stunting, seperti praktik pernikahan dini, rendahnya tingkat pendidikan, masalah pekerjaan dan pendapatan yang memicu terjadinya stunting. Rata-rata masyarakat bekerja sebagai petani, dimana masyarakat masih kekurangan kebutuhan sehari-hari. Masalah pekerjaan ini juga disebabkan rendahnya pendidikan orang tua sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Keadaan masyarakat di daerah yang terkena kasus stunting adalah daerah yang berpenghasilan rendah. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor yang menentukan kurangnya persiapan orang tua untuk membesarkan anak, dan kurangnya pendidikan membuat orang tua tidak memahami pola asuh yang baik dan pemenuhan gizi anak tidak

¹⁷Dahlan Tampubolon. 2020. Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi. Jurnal Kebijakan Publik. Vol 11. No 1. Hlm 1- 58

tercukupi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan stunting. Pemerintah Kabupaten Jember telah berkomitmen untuk mengatasi stunting dengan membuat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/167/1.12/2019 tentang Daftar Balita Stunting Sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-) di Kabupaten Jember Tahun 2019 dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/96/1.12/2019 tentang Tim Koordinasi Daerah Perencanaan Teknis Penanganan Balita Stunting¹⁸.

Selanjutnya penelitian Yurista Permanasari dkk, dengan judul Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. Hasilnya, tantangan dalam melaksanakan konvergensi adalah masih adanya ego sektoral di setiap OPD karena sosialisasi yang kurang optimal dan banyak program pencegahan stunting tidak dipahami. Hal ini disebabkan oleh terlambatnya pengumpulan informasi, terhambatnya penyampaian informasi oleh petugas yang datang saat sosialisasi, dan sulitnya kondisi demografi daerah di daerah tertentu. Ego sektoral juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya fungsi Bappeda sebagai koordinator dalam konvergensi. Alasan lainnya, pada saat penelitian dilakukan, juklak dan juknis pelaksanaan program belum diperoleh secara maksimal, sehingga daerah masih belum mengetahui langkah-langkah pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, daerah membutuhkan bantuan pusat untuk melaksanakan langkah-

¹⁸Irma Fitriana Ulfah dan Arief Budi Nugroho. 2020. Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting Di Kabupaten Jember. Jurnal Sosial Politik. Vol 6. No 2. Hlm 201 – 213.

langkah tersebut. Kendala lain adalah database yang sama tidak tersedia untuk memperkirakan tujuan program¹⁹.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Dinas Kesehatan dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Pasaman.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Strategi Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Pasaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan strategi dinas kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Pasaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini mempunyai andil dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, karena terdapat berbagai kajian Administrasi Publik terutama

¹⁹Yurista Permanasari, dkk. 2020. Tantangan Implementasi Konvergensi Pada Program Pencegahan Stunting Di Kabupaten Prioritas. Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan. Vol 30. No 4. Hlm 315-328.

dalam penanganan stunting. Dan juga dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai acuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga memperkuat teori-teori dalam strategi. Dengan itu, penelitian dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, referensi dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi instansi terkait, untuk meningkatkan kualitas dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kekurangan yang ada guna mencapai prestasi kerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada instansi terkait dalam meningkatkan strategi penanganan stunting.

